

Membaca Radikalisme Semu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Analisis Wacana Isu Taliban pada Tubuh KPK

Hanna Nurhaqiqi

UPN Veteran Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

hanna.nurhaqiqi.ilkom@upnjatim.ac.id

Abstract

The case of the failure of 75 KPK employees is claimed to have something to do with radicalism within the KPK. Through this discourse analysis of news texts, a study of the meaning of the news texts of Koran Tempo and Republika is carried out to determine the structure of the news text, social cognition, and social context. The results found are Koran Tempo and Republika, with different media ideologies, have an intersecting discourse structure where they both assume that radicalism related to the failure of 75 KPK employees has no facts. There needs to be clarity from the TWK test preparation of the government agency.

Keywords: Discourse Analysis, Radicalism, KPK, Taliban

Abstrak

Kasus tidak lolosnya 75 pegawai KPK diklaim ada kaitannya dengan isu radikalisme pada tubuh KPK. Melalui analisis wacana teks berita ini melakukan kajian makna pada teks berita Koran Tempo dan Republika untuk mengetahui struktur teks berita, kognisi sosial dan konteks sosial. Hasil yang ditemukan ialah Koran Tempo dan Republika dengan ideologi media yang berbeda memiliki struktur wacana yang beririsan dimana sama-sama menganggap bahwa isu radikalisme kaitannya dengan tidak lolosnya 75 pegawai KPK masih belum ada fakta dan perlu ada kejelasan dari lembaga pemerintahan penyusunan uji TWK.

Kata Kunci: analisis wacana, radikalisme, KPK, Taliban

Pendahuluan

Perkembangan media berita terus bergerak dan memiliki banyak pengaruh. Sudah tidak lagi menjadi perbincangan rahasia bahwa munculnya oligopoli media, dimana media-media yang ada terlihat banyak tetapi dimiliki oleh beberapa pihak saja. Hal ini menengarai akan adanya homogenisasi berita serta potensi munculnya kepentingan media dalam setiap pemberitaannya.

Mengenai munculnya kasus tidak lolosnya 75 pegawai KPK pada uji Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sempat menjadi perbincangan hangat pada berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Sudah sejak lama sejak kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan hingga kini munculnya kasus alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengamati perkembangan media dalam memberitakan perkembangan kasus KPK dapat sebagai titik awal dalam mengamati pada kepentingan siapa yang sedang berkuasa dan wacana apa yang kemudian muncul di publik. Apakah kemudian perbedaan ideologi media dapat memberikan sudut pandang pemberitaan yang berbeda mengenai kasus tidak lolosnya 75 pegawai KPK pada uji TWK. Melalui analisis wacana ini sebagai upaya untuk mengkaji lebih jauh pada makna-makna yang muncul pada teks berita.

Terdapat klaim dari pihak KPK, diutarakan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan ada tiga aspek yang diukur dalam tes wawasan kebangsaan, yaitu integritas, netralitas, dan radikalisme. Aspek terakhir, yakni radikalisme yang kemudian menjadi perbincangan luas. Berdasarkan tesaurus KBBI Kemdikbud, radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam hal ini, isu radikalisme dikaitkan dengan istilah 'Kaum Taliban' dan 'Kadrun' sebagai stigma pada para pegawai KPK yang beragama Islam.

Sebelum melakukan analisis wacana pada teks berita, akan dibahas beberapa penelitian yang melakukan analisis wacana pada teks berita sebagai langkah awal pada penelitian ini.

Terdapat penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dengan memiliki persamaan dan perbedaan terhadap hasil penulisan riset ini. Penelitian dengan judul “Analisis Wacana Kritis Berita tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dalam Harian Bali Post” melakukan analisis secara mendalam pada berita utama di Harian Post (Utama 2015). Dalam analisis tersebut ditemukan Pemerintah selaku inisiatif RTRWP digambarkan secara negatif dan aktor-aktor yang berseberangan dengan Pemerintah seperti DPRD, akademisi, serta Kepala Pusat Lingkungan Hidup Bali Nusra digambarkan secara positif.

Selanjutnya terdapat penelitian dengan judul “Analisis Wacana Kritis Berita Konflik di Media Ambon Ekspres dan Siwalima” (Husein dan Wance 2021). Penelitian tersebut secara khusus mengkaji berita konflik pada enam teks berita di Ambon Ekspres dan Siwalima dan ditemukan masih terdapat sudut pandang ideologi ataupun agama dalam penulisan beritanya. Berita tersebut dikaji dengan identifikasi Struktur Makro, Super Struktur, dan Struktur Mikro.

Kemudian juga terdapat penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Wacana Kritis Teks Berita *Jawa Pos* terkait Penetapan Dahlan Iskan sebagai Tersangka Kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik” (Kusno 2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan *Jawa Pos* mengenai kasus Dahlan Iskan cenderung positif dan tidak bersalah. Pengkajian teks tersebut dibagi menjadi tiga hasil analisis, yakni analisis tekstual (analisis mikro), analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana, dan yang terakhir ialah dimensi praktik sosial budaya (makro).

Melalui tiga penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan yakni menganalisis teks berita secara deskriptif kualitatif dengan analisis wacana kritis dengan masing-masing isu yang diangkat, yakni Pemerintah dengan para aktor non-pemerintah, pemberitaan dengan nuansa ideologi tertentu, serta keberpihakan media terhadap pemiliknya. Relasi-relasi yang muncul memberikan makna yang lebih jauh dari apa yang disampaikan pada berita-berita tersebut. Maka pada penelitian ini, yakni pemberitaan Koran Tempo dan Republika untuk melakukan pengkajian mendalam pada kasus KPK dan isu Taliban mengenai tidak lolosnya 75 pegawai KPK pada saat Tes TWK lampau.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pada teks berita Koran Tempo dan Republika pada hari dikeluarkannya Surat Keputusan hasil seleksi TWK yakni pada tanggal 7 Mei 2021. Khusus pada hari tersebut, penelitian ini melakukan analisis wacana mengenai pemberitaan Kasus KPK dan isu Taliban mengenai tidak lolosnya 75 pegawai KPK pada saat Tes TWK.

Tabel 1. Elemen Wacana pada Van Dijk (Eriyanto 2001)

Struktur Wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur Makro	Tema/topik dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Superstruktur	Skematik Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal dengan memberi detail pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detail sisi lain	Latar, Detail, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti

Hasil dan Pembahasan

Edisi yang diambil sebagai data penelitian ialah 7 Mei 2021 dimana Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) resmi dikeluarkan. Data Teks Berita dalam penelitian ini berupa satu cover story, lima berita utama,

dan satu editorial pada Koran Tempo serta satu cover dan tiga berita nasional pada Koran Republika. Berikut merupakan judul berita pada masing-masing surat kabar.

Tabel 2. Dua Hari Surat Kabar Edisi 7 Mei 2021

Koran Tempo		Republika	
Cover Story	Kedok Kampanye Anti-Taliban	Cover	Pemudik Masih Nekat: Pemerintah menegaskan akan menindak tegas para pelanggar. (Bukan tentang KPK)
Berita Utama	Menjegal Pegawai Segudang Prestasi	Nasional	KPK Didesak Buka-bukaan
Berita Utama	Mereka Bukan 'Kadrun'	Nasional	Pertanyaan Qunut Tendensius
Berita Utama	Bergantung Pada Keputusan Tujuh Lembaga	Nasional	MKD Sepakat Bawa Kasus Aziz ke Pleno
Berita Utama	Mengalir Dukungan Bagi Pegawai KPK		
Berita Utama	Asa Tersisa dari 75 Pegawai KPK		
Editorial	Begundal Pemberangus Pemberantasan Korupsi		

Hasil dan pembahasan akan disusun berdasarkan tiga urutan analisis yakni, Analisis Teks Berita, Kognisi Sosial dan selanjutnya Konteks Sosial yang muncul pada wacana teks berita.

Struktur Teks Berita

Dalam melakukan analisis wacana diperlukan penjabaran struktur teks berita (dapat dilihat pada Tabel 1. Elemen Wacana Van Dijk) yang dibagi ke dalam tiga struktur wacana, yakni Struktur Makro, Superstruktur, dan Struktur Mikro.

Pada tataran struktur makro, hal yang diamati ialah tematik, mengutamakan topik atau tema yang diangkat dalam suatu berita. Koran Tempo menjadikan kasus tidak lolosnya 75 pegawai pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai cover story dan berita utama sejak tiga edisi sebelumnya, yakni 4 Mei "Permainan Terakhir"; 5 Mei "KO"; 6 Mei "Bola Panas"; lalu selanjutnya cover story pada 7 Mei tepat dikeluarkannya SK No 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK "Kedok Kampanye Anti Taliban". Secara konsisten Koran Tempo memberitakan kasus 75 pegawai KPK yang tidak lolos uji TWK ini sebagai berita utama. Dengan nada yang sama, yakni mempertanyakan mengapa terdapat 75 pegawai KPK yang tidak lolos uji TWK sedangkan tidak ditemukan kasus-kasus buruk yang terdapat pada 75 pegawai tersebut. Lalu pada edisi yang sama, yakni 7 Mei 2021, pada berita utama atau *headline* koran Republika tidak memunculkan topik KPK akan tetapi "Pemudik masih nekat: Pemerintah menindak tegas para pelanggar". Pemberitaan mengenai KPK muncul pada halaman ke tiga yakni pada berita Nasional. Terdapat dua berita yakni "KPK Didesak Buka-Bukaan" dan "Pertanyaan Qunut Tendensius" yang berkaitan untuk meminta klarifikasi kepada publik mengenai penolakan 75 pegawai melalui hasil uji TWK. Sedangkan terdapat satu berita dengan judul "MKD sepakat bawa kasus Aziz ke Pleno" yang tidak berkaitan dengan kasus 75 pegawai KPK tetapi mengangkat dugaan Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR, berdasarkan keterangan KPK Aziz menginisiasi dan meminta Stephanus menghentikan Syahril –yang keduanya merupakan tersangka suap—dalam penyelidikan kasus korupsi di KPK. Stephanus Robin Pattuju merupakan penyidik KPK saat itu dan M Syahril merupakan Wali Kota Tanjung Balai.

Terdapat enam berita utama untuk Koran Tempo. Judul pertama "Menjegal Pegawai Segudang Prestasi" memberi penekanan pada unsur Radikalisme sebagai salah satu dasar uji TWK harus diperjelas. Berikut *lead* berita yang memberikan gambaran isu radikalisme semu pada proses TWK, "Stigma 'Islam Radikal' dan 'Kaum Taliban' bagi sejumlah penyidik KPK diduga merupakan bagian dari kampanye pembusukan lembaga anti rasuah itu." Kemudian dilanjutkan dengan "Tes wawasan kebangsaan—yang diklaim untuk menangkal radikalisme—terbukti tak hanya menjegal penyidik dan pegawai yang beragama Islam". Pada kalimat tersebut, berita ini

menegaskan bahwa isu radikalisme sebagai asas tidak diterimanya 75 pegawai KPK menjadi tidak relevan, karena terdapat beberapa pegawai yang bukan beragama Islam.

Kemudian dilanjutkan pada berita kedua “Mereka bukan ‘Kadrun’”. Istilah ‘Kadrun’ atau kepanjangan dari Kadal Gurun yang sempat marak pasca Pilkada DKI 2012 lampau. Serta julukan bagi para pegawai KPK yang beragama Islam. Pada berita ini memberikan detail pada tiga sosok pegawai KPK yang tidak lolos pada uji TWK dan beragama bukan Islam yakni, Ambarita Damanik, Marc Falentino, Rasamala Aritonang, Benydictus Siumlala, dan Rieswin. Pada struktur mikro, detail yang diberikan pada teks berita ini sebagai gambaran dan penguatan isu radikalisme semu yang berusaha disampaikan oleh Koran Tempo kepada pihak KPK. Bahwa belum ada keterkaitan antara Stigma Radikal dengan tidak diterimanya beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan bukan beragama Islam. Pada berita ini menjadi antitesis dari TWK dalam membersihkan KPK dari ‘Taliban’ dan ‘Radikalisme’.

Pada berita ketiga, “Bergantung pada keputusan Tujuh Lembaga”, pada struktur mikro mengenai Koherensi, terletak di paragraf ke delapan yakni Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo yang menolak untuk memberi klarifikasi dalam pelaksanaan tes TWK karena pihaknya merasa tidak dilibatkan. Pernyataan dalam berita ini untuk saling mengaitkan pada lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam penyusunan TWK yakni, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Lalu pada berita keempat “Mengalir dukungan bagi Pegawai KPK” tidak secara eksplisit memunculkan isu radikalisme dan Taliban dalam pemberitaannya. Berita ini memunculkan detail dukungan dari elemen masyarakat dan akademisi dalam mengusut tidak lolosnya 75 pegawai KPK pada uji TWK, yakni Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni; Pakar Hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti; serta Pegiat antikorupsi sekaligus dosen hukum administrasi negara dari Universitas Bengkulu, Beni Kurnia Illahi.

Pada berita kelima dengan judul “Asa tersisa dari 75 pegawai KPK” pada *lead* berita menunjukka kasus 75 pegawai sebagai “Skenario pelemahan KPK merupakan kejahatan sempurna untuk membunuh lembaga antikorupsi”. *Lead* yang merupakan kutipan dari Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada dengan istilah ‘Kejahatan Sempurna’ sebagai penguatan isu pelemahan KPK dibalik isu radikalisme semu.

Pada teks terakhir editorial Koran Tempo yakni “Begundal Pemberangus Pemberantasan Korupsi” muncul sintaksis “Mereka dituding sebagai Taliban dan kadrun, suatu tudingan ngawur, karena tak sedikit yang berlatar belakang Kristen dan Buddha”, “Mula-mula, bersamaan dengan upaya merevisi UU KPK, mereka melabeli penyidik KPK dengan sebutan Taliban dan frasa rasis “kadal gurun” atau kadrun” lalu dilanjutkan “TWK sengaja dibuat untuk memisahkan: antara pegawai yang berwawasan kebangsaan yang dituduh Taliban/Kadrun” hingga muncul “Fakta itu menegaskan bahwa propaganda Taliban dan kadrun sama sekali tidak berhubungan dengan wawasan kebangsaan”. Pada teks editorial ini memberikan pemaparan mengenai kemunculan isu radikalisme dan Taliban serta dugaan pelemahan KPK.

Kemudian pada berita utama Koran Republika pada edisi yang sama, membahas tentang “Pemudik masih nekat: Pemerintah menegaskan akan menindak tegas para pelanggar”. Pada edisi-edisi sebelumnya juga koran Republika lebih memberitakan mengenai perkembangan covid dan vaksin. Kasus KPK muncul pada rubrik Nasional dengan judul “KPK Didesak Buka-bukaan” memiliki Semantik yang sama dengan Koran Tempo untuk melakukan klarifikasi mengenai tidak lolosnya 75 pegawai KPK pada uji TWK. Diperkuat dengan berita nasional selanjutnya dengan judul “Pertanyaan Qunut Tendensius”, terdapat semantik mengenai pembahasan pada pertanyaan tentang Qunut dan kapan menikah sebagai bahasan berita. Detail yang muncul ialah memunculkan pendapat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti sebagai pertanyaan yang sangat tendensius, pendapat Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amirsyah Tambunan, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji

Ahmad; dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago yang juga turut mempertanyakan mengapa muncul terkait Qunut.

Kognisi Sosial

Van Dijk pada analisis wacana lebih menekankan pada isu etnis, rasisme, dan pengungsi. Isu mengenai kelompok yang mayoritas tetapi tidak dominan dan bagaimana penggambarannya pada analisis wacana. Melalui kognisi sosial, merupakan analisis teks lanjutan dari struktur berita. Teks dalam hal ini didasarkan pada asumsi tidak memiliki makna melainkan kesadaran mental pada pemakai bahasanya (Eriyanto 2001). Hal ini tidak terlepas dari manusia sebagai bagian dari tatanan masyarakat sosial yang tidak terlepas dari perspektif dan asumsi mengenai sebuah peristiwa.

Dalam analisis wacana ini mengambil skema peristiwa sebagai model kognisi sosial. Pada penelitian ini mengambil dua surat kabar nasional yakni Koran Tempo dan Republika. Dimana satu sama lain memiliki ideologi pemberitaan yang berbeda. Tempo terkenal dengan jurnalisme investigasi, seperti pada Liptan Utama yang muncul pada produk majalah Tempo serta Cover Story dan berita-berita utama Koran Tempo. Secara intens memberitakan isu politik dan pemerintah. Sedangkan pada Republika, surat kabar ini dikenal dengan surat kabar islami. Karena secara konsisten memproduksi rubrik-rubrik islami sejak awal. Seperti rubrik Khazanah, Dialog Jumat, Ramadhan, dan info Haji. Isu mengenai Palestina pada Republika lebih sering muncul dan banyak diberitakan. Hal ini yang kemudian menjadi ciri khas Republika.

Mengambil dua surat kabar ini dengan ideologi yang berbeda sebagai pembandingan dalam menganalisis wacana pada teks berita isu radikalisme di KPK. Keduanya, Koran Tempo dan Republika, sama-sama memberikan tuduhan kepada pihak KPK dan lembaga-lembaga yang terkait dalam hal tidak lolosnya 75 pegawai KPK. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan isu radikalisme semu, dimana isu yang seolah-olah ada sebagai bentuk pelemahan KPK.

Pada tulisan Editorial Koran Tempo, sebuah rubrik dimana wartawan dapat berbicara lebih banyak, memberikan penguatan mengenai isu radikalisme semu dimana istilah 'Radikalisme', 'Kadrun, dan 'Kaum Taliban' tidak ada fakta yang valid yang muncul pada 75 pegawai KPK.

Konteks Sosial

Tahapan analisis wacana yang terakhir ialah Konteks Sosial. Wacana apa yang kemudian muncul dan kemudian diproduksi di masyarakat. Menurut Van Dijk, terdapat dua hal yang perlu diamati dalam menganalisis wacana yang berkembang di masyarakat (Eriyanto 2001). Pertama, praktik kekuasaan, dalam teks berita baik pada Koran Tempo dan koran Republika terlihat bahwa posisi media berada pada pihak yang sama dengan publik yakni membela 75 pegawai KPK yang tidak lolos uji TWK dan ini dihadapkan dengan Pemerintah dan KPK. Pemerintah dalam hal ini berperan terkait penyusunan dan pelaksanaan uji TWK oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Maka begitu terlihat bahwa publik dan media berhadapan dengan pemerintah, mengingat KPK saat ini telah menjadi aset negara.

Berdasarkan satu cover story, lima berita utama, satu editorial, dan tiga berita nasional mengenai tidak lolosnya 75 pegawai KPK memunculkan sentimen negatif pada pemerintah mengenai pelemahan lembaga KPK. Isu Radikalisme yang diangkat tidak dapat memunculkan fakta ataupun data valid sehingga menjadi semu dan tidak nyata. Kubu yang muncul terlihat cukup ideal dimana media dan publik berada pada pihak yang sama untuk membela KPK dari ketidakjelasan akan uji TWK sebagai proses pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini bersama dengan pemerintah dalam proses uji kelayakannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada teks berita Koran Tempo dan Republika dapat diambil kesimpulan melalui tiga proses analisis wacana. Kesan tersebut dapat dikaji melalui tataran struktur makro, superstruktur dan struktur mikro.

Pada struktur makro, topik-topik berita yang diangkat secara tegas memberi kesan negatif pada lembaga KPK yang saat itu belum memberi kejelasan dan fakta yang valid mengenai alasan tidak lolosnya 75 pegawai KPK. Superstruktur berita yang muncul mengenai pemberitaan KPK seperti pada cover story dan dua berita, lead yang muncul memperkuat kesan negatif pada tubuh KPK, khususnya dalam menampik isu radikalisme pada 75 pegawai KPK. Lalu pada struktur mikro, secara semantik dan sintaksis memberikan detail serta koherensi yang relevan akan tidak terbuktinya fakta isu radikalisme pada 75 pegawai KPK yang tidak lolos pada uji TWK.

Selanjutnya, pada kognisi sosial, Koran Tempo dan Republika sebagai media berita nasional dengan ideologi yang berbeda justru memiliki kesamaan nilai dalam pemberitaan kasus 75 pegawai KPK ini dengan isu radikalisme sebagai alasan dibalik pelamahan lembaga KPK. Dengan memberikan fakta pada masing-masing berita mengenai tidak relevannya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap privat dan muncul dalam uji TWK. Hal tersebut muncul pada dua media berita nasional, yakni Koran Tempo dan Republika.

Wacana dan diskursus yang berkembang di masyarakat memiliki keberpihakan yang sama pada apa yang diberitakan oleh media. Hal ini menarik, karena publik dan media berada pada pihak yang sama yakni membela 75 pegawai KPK dan berhadapan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan uji TWK.

Secara keseluruhan, pada penelitian ini memberikan analisis wacana mengenai kasus tidak lolosnya 75 pegawai KPK sebagai isu yang disepakati bersama baik pihak publik dan media. Sedangkan pada sisi lain yang (Dijk 1988) menjadi lawan bersama ialah pemerintah dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyusunan uji TWK menjadi *common enemy* atau musuh bersama, karena kaitannya dengan ketidakjelasan 75 pegawai KPK. Maka dapat disimpulkan bahwa isu radikalisme yang diusung dalam uji TWK menjadi semu atau tidak nyata, karena belum adanya fakta yang valid serta belum adanya dialog terbuka dari pihak KPK dalam membahas hal ini.

Referensi

- Dijk, Teun A Van. 1988. *News as Discourse*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Husein, Muhammad Iqbal, dan Marno Wance. 2021. "Analisis Wacana Kritis Berita Konflik di Media Ambon Ekspres dan Siwalima." *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.1. No.9. Februari. ISSN 2722-9467 1995-2010.
- Kusno, Ali. 2015. "Analisis Wacana Kritis Teks Berita Jawa Pos terkait Penetapan Dahlan Iskan sebagai Tersangka Kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik (Sebuah Analisis Wacana Kritis)." *Medan Makna*. Vol. XIII. No.2. Desember. ISSN 1829-9237 103-116.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Utama, I Dewa Gede Budi. 2015. "Analisis Wacana Kritis Berita tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dalam Harian Bali Post." *Jurnal Linguistika*. Vol 22. Maret 108-131.